KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perindo minta anggota DPR tolak Rp 48,7 M untuk Gorden rumah dinas
Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Perindo Minta Anggota DPR Tolak Rp48,7 M untuk Gorden Rumah Dinas

JAKARTA – Alokasi anggaran Rp48,7 miliar untuk pergantian gorden rumah jabatan anggota (RJA) DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dinilai belum mendesak. Anggota DPR pun diminta untuk menolak rencana pergantian yang dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tersebut.

"Seluruh anggota DPR kalau mereka punya nurani, punya moral yang baik *ya*, mereka harus marah, kenapa Setjen mengeluarkan anggaran untuk pengadaan gorden di situasi sekarang ini," ujar Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yusuf Lakaseng, dalam Live MNC News, kemarin.

Menurutnya, baik pejabat publik maupun teknokrat seharusnya lebih bisa mengedepankan empati kepada masyarakat Indonesia yang selama ini tengah menghadapi kesulitan di masa pandemi Covid-19. Yusuf berpandangan, jika penganggaran itu diteruskan, bukan tidak mungkin citra lembaga DPR RI akan dicap buruk oleh rakyat.

Yusuf mengusulkan agar barang-barang seperti gorden ini seharusnya ditanggung oleh anggota DPR itu sendiri. Menurutnya, anggota dewan masih mampu untuk mengganti barang-barang itu di rumah dinasnya. "Saya punya teman anggota DPR RI, itu rumah dia, dia benahi sendiri *kok* yang dia tinggali di Kalibata itu. Gordennya dibeli sendiri, sofanya dia ganti, beli sendiri sesuai dengan selera dan keinginan dia, dan itu hal yang biasa saja. Kalau yang gorden *gitu*, sudahlah kasih ke anggota DPR saja. Dengan segala macam tunjangan dan penghasilan mereka. Mereka bisa membenahi itu sendiri," tuturnya.

Lebih jauh Yusuf menilai anggaran Rp48,7 miliar lebih baik digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) yang tengah menghadapi kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak sekali rakyat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaan, di-PHK oleh perusahaannya. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang usahanya gulung tikar akibat tak mampu lagi menghadapi keadaan ekonomi yang serba-sulit. "Coba bayangi, kalau Rp48,7 miliar itu dipakai untuk membantu UMKM, begitu banyak lapangan kerja yang bisa terserap," katanya.

Yusuf menegaskan, jika anggaran itu dialihkan untuk pemberdayaan yang bisa menyerap lapangan pekerjaan, maka hal ini jauh lebih bermanfaat dibanding harus mengganti gorden untuk rumah dinas anggota Dewan. "Rakyat lagi menderita, negara lagi cekak anggaran, lalu *kok* ada anggaran begitu besar, puluhan miliar dipakai untuk beli gorden," ucapnya.

Sebelumnya Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan anggaran Rp48 miliar untuk penggantian gorden ini ditujukan untuk 505 rumah dinas anggota DPR RI. Satu rumah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp90 juta sudah termasuk pajak. "Untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp80 juta sekian, sama pajak Rp90 jutaan per rumah," kata Indra.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, penggantian gorden sebenarnya sudah direncanakan sejak 2015. Mengingat ketersediaan anggaran, maka baru tahun ini bisa terealisasi penggantiannya. "Sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka. Itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," ungkapnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku banyak unit-unit di rumah dinas (rumdin) anggota DPR yang tidak ada gorden. Ia kembali menegaskan bahwa keluhan ini bukan saja dirasa oleh anggota Dewan periode ini, tapi juga periode sebelumnya. Saat disinggung soal banyaknya anggota Dewan yang tak menempati rumdin, Dasco menampiknya. Dia menegaskan bahwa rumdin menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan anggota Dewan. "Persentase antara yang tidak menempati dan menempati, saya rasa lebih banyak yang ditempati karena ini banyak yang dari daerah, kita sudah cek itu," ujarnya.

tim KORAN SINDO